

**MAKNA *MONEY POLITICS* PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

Ika Setia Rini

094254246 (PPKn, FIS, UNESA) iecha.sethya@yahoo.co.id

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FIS, UNESA) rr_nanik_setyowati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *money politics* dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Informan penelitian disini yaitu orang-orang (masyarakat kelas bawah) Desa Sumberejo yang diambil menggunakan teknik judgement sampling (sampel pertimbangan). Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu model analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna *money politics* pada masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo sangat beragam. Pemaknaan tersebut antara lain yaitu : a) sebagai rejeki yang tidak terduga, b) tambahan rejeki, c) rejeki nomplok d) bonus rutin, e) tradisi turun-temurun, f) ajang balas budi, g) kontrak atau perjanjian kerjasama, dan h) ajang tolong-menolong antar sesama. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa antara lain yaitu : a) faktor ekonomi, b) faktor pendidikan, c) faktor tradisi, dan d) faktor kesempatan.

Kata kunci : Makna *Money Politics*, Masyarakat Kelas Bawah, Pemilihan Kepala Desa

Abstract

This research aims to know the meaning of *money politics* and the factor-factor cause the lower class society in Sumberejo village sub-district Lamongan district of Lamongan willing to accept *money politics* the election of the head a village. This research used the qualitative approach with design research phenomenology. Informant research here are people (people of lower class) captured Sumberejo village using the technique of judgement sampling (sampling considerations). The Research data gathered through observation, interviews, and documentation. Then the data were analyzed using the analysis of the data model and the Miles data analysis model which Huberman interactive. The results of this research show that the meaning of *money politics* in the lower class society in Sumberejo village is very diverse. Mean among which are : a) as unexpected good fortune, b) additional fortune, c) fortune nomplok d) routine bonuses, e) the tradition passed down through generations, f) event favors, g) contract or cooperative agreement, and h) the tolong-menolong between each other. While the factors that lead to the lower class society in Sumberejo village in sub-district Lamongan district of Lamongan willing to accept *money politics* head of the election for village chief among which are : a) the factor economic, b) the factor education c) the factor tradition, and d) the factor of chance.

Keywords : The Meaning of *Money Politics*, Society of Lower Class, The Election of the Head a Village.

PENDAHULUAN

Memperhatikan kondisi demokrasi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat erat dengan permainan politik uang (*Money Politics*). Politik uang terdiri dari dua dimensi kata, yakni politik dan uang. Politik diidentikkan sebagai suatu orientasi pada kekuasaan dan uang dianggap sebagai salah satu kekuatan yang berbasis material. *Money politics* yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum merupakan upaya untuk memperoleh kekuasaan di bidang politik dengan menjadikan uang (materi) sebagai perantara

(kekuatan). Dinamika politik dinilai sangat erat dengan kekuasaan, karena pada dasarnya tujuan dari perjuangan politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik. Sementara itu, untuk merebut kekuasaan politik sangat dekat dengan uang (materi) sebagai perantaranya.

Pemilihan Umum (Pemilu) secara tidak langsung merupakan ajang persemaian demokrasi di negara kita untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu. Melalui pesta demokrasi ini, diharapkan segala aspirasi rakyat yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan

bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Realita yang ada dalam suatu pesta demokrasi, untuk memperoleh kekuasaan politik calon pejabat publik terkadang rela melakukan upaya-upaya instan demi mendapatkan kursi pemerintahan (kedudukan) yang diinginkan. Salah satu upaya yang sering kita temui adalah adanya permainan *money politics*. Fenomena *money politics* umumnya dapat kita jumpai di berbagai ajang Pemilihan Umum, baik itu pada Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa (Kades), dan ironisnya kadang merembet sampai pada Pemilihan Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa praktik *money politics* nyatanya lebih membudaya, dilestarikan, dan secara terang-terangan terjadi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Permainan politik yang seperti ini merupakan bagian dari fakta sosial (realitas sosial) yang ada di sekitar kita. Realitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah akan *money politics* dan bahaya yang ditimbulkan oleh *money politics*. Adanya praktik *money politics* yang membudaya setiap Pemilihan Kepala Desa sangat membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat membantu masyarakat kalangan kelas bawah yang turut mencicipi. Namun tidak menutup kemungkinan semua tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomi tersebut dapat mengorbankan tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan negara demokrasi dan meningkatkan moralitas bangsa.

Budaya *money politics* yang terjadi pada setiap Pemilihan Kepala Desa menunjukkan bahwa para calon Kepala Desa yang akan menduduki jabatan tertinggi di tingkat desa tersebut memiliki kualitas yang rendah dan tidak memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik. Padahal ciri khas demokrasi yang sebenarnya adalah adanya kebebasan (*freedom*), adanya persamaan derajat (*equality*), dan adanya kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Praktik *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa sudah berkembang dan membudidaya di berbagai segmen masyarakat kita. Tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan kelas atas dan kelas menengah juga terlibat dalam praktik tersebut, karena praktik ini bersifat menyeluruh dan melibatkan semua lapisan tanpa membedakan jadi tinggal masyarakat sendiri

yang menentukan dan menilai. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, masyarakat kalangan kelas bawah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terpengaruh dalam praktik tersebut karena tingkat kesadaran politik mereka yang rendah dan kurang jika dibandingkan dengan lapisan lain.

Masyarakat kalangan kelas bawah mayoritas mudah menjadi sasaran para calon Kepala Desa yang menjalankan praktik *money politics*. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat kalangan kelas bawah umumnya bersedia menjual hak suara mereka karena mendapatkan imbalan materi dari para calon Kepala Desa yang melakukan praktik *money politics*. Disini jelas terlihat adanya hubungan *simbiosis mutualisme* antara penerima dan pemberi.

Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat kalangan kelas bawah baik dilihat dari segi desakan ekonomi yang menghimpit dan kesadaran politik yang rendah serta bahaya jangka panjang *money politics* itu sendiri, membuat mereka mudah terpengaruh oleh para calon Kepala Desa yang melakukan praktik *money politics* tanpa berfikir panjang terlebih dahulu. Walaupun tidak semua kalangan kelas bawah memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah, namun mayoritas kalangan kelas bawah selalu mudah untuk menjual hak suara mereka demi mendapatkan uang atau materi lainnya.

Pemikiran yang salah mengenai *money politics* telah berkembang dan dibangun di kalangan masyarakat kelas bawah. Bukan hanya menjadi pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan politik, bahkan telah menjadi prinsip dalam kehidupan sehari-hari sejak dahulu bahwa mereka hanya tunduk, loyal, dan setia terhadap segala kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Tindakan individu yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari itu sebenarnya dilandaskan pada makna-makna yang sudah menjadi anggapan mereka dan sudah menjadi kebenaran bagi mereka. Kalaupun nanti ada kesalahan atau pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik mereka tidak akan berbalik menuntut visi, misi, dan program kerja yang dijanjikan pada saat masa kampanye dulu.

Fakta sosial yang sudah membudaya dan dilestarikan dari waktu ke waktu tersebut juga dapat kita jumpai pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Lamongan. Alasan pemilihan Kecamatan Lamongan karena ibu kota dan pusat pemerintahan Kota Lamongan yang nyatanya membudayakan praktik *money politics* secara terang-terangan. Seperti halnya yang terjadi menjelang Pemilihan Kepala Desa di tempat lain, di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan juga marak terjadi

praktik *money politics* yang menyerang semua kalangan masyarakat contohnya di Desa Sumberejo.

Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang melangsungkan Pemilihan Kepala Desa serentak pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013. Pemilihan ini diikuti oleh empat Dusun yaitu Kaotan, Sawo, Plandi, dan Dampit dengan latar belakang penduduknya mayoritas kalangan kelas bawah. Masyarakat kalangan kelas bawah di Desa Sumberejo ± berjumlah 352 kepala keluarga dari 576 kepala keluarga. Jumlah calon Kepala Desa yang baru hanya dua orang, yang bernama Sulika dan Sumantri. Sulika adalah Kepala Desa sebelumnya yang mencalonkan diri kembali, sedangkan Sumantri adalah calon kandidat baru yang sebelumnya tidak pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Alasan pemilihan Desa Sumberejo karena menjelang Pemilihan Kepala Desa telah marak terjadi praktik *money politics* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa yaitu Sumantri dengan membagi-bagikan sembako dan uang berjumlah Rp. 25.000,-. Sedangkan Sulika tidak melakukan praktik *money politics* pada pemilihan kali ini. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat kalangan kelas bawah Desa Sumberejo lebih mudah untuk dipengaruhi dan diambil hak pilihnya padahal dampak buruknya akan diterima oleh masyarakat sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *money politics* dan faktor penyebab masyarakat kelas bawah bersedia menerima *money politics*. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Makna *Money Politics* pada Masyarakat Kelas Bawah dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan memaknai *money politics* pada Pemilihan Kepala Desa ? (2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa ?

Masyarakat Kelas Bawah

Dalam realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah mayoritas menjadi korban dalam kompetisi perebutan kekuasaan atau kedudukan tertinggi. Hal tersebut disebabkan masyarakat kelas bawah merupakan kalangan yang memiliki banyak kekurangan berbeda dengan kelas atas dan kelas menengah. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat kelas bawah menjadi hilang digantikan dengan keharusan atau paksaan dari pihak yang lebih banyak memiliki kekuasaan atau

kekayaan. Mereka yang memiliki uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan, serta mereka yang mempunyai kekuasaan besar mudah menjadi kaya dan mengusahakan ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan.

Menurut standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan kelas bawah atau masyarakat miskin, antara lain : 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan, 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD, dan 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel di atas terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikategorikan atau dapat dikatakan sebagai masyarakat kalangan kelas bawah.

Teori Motivasi (Hierarki Kebutuhan) Abraham Maslow

Motivasi berasal dari kata “*movere*” yang berarti dorongan. Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan dilakukan oleh seorang atau individu dalam hidupnya. Jika seseorang dikatakan memiliki motivasi yang tinggi, berarti seseorang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan sesuatu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar

dirinya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang disebut motivasi intrinsik, dan yang berasal dari luar adalah motivasi ekstrinsik.

Tahun 1943, seorang psikologis dari Amerika yaitu Abraham Maslow, menulis sebuah mahakarya yang sangat berpengaruh di bidang psikologi motivasi. Hal itu dikarenakan teori motivasi yang paling terkenal saat itu adalah hierarki teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Dalam hierarki teori kebutuhannya, Abraham Maslow mengungkapkan berbagai tingkatan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik hingga psikologis.

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu :

- a) Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup misalnya makan, minum, perlindungan fisik, dan bernapas. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar bagi setiap individu,
- b) Kebutuhan rasa aman atau keselamatan adalah kebutuhan akan perlindungan diri dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual,
- c) Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial) adalah kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai dalam keluarga. Kebutuhan ini pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status sosial,
- d) Kebutuhan akan harga diri atau penghargaan adalah kebutuhan untuk dihormati, diakui dan dihargai oleh orang lain atas prestasi yang telah dicapai, dan
- e) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri adalah kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi yang dimiliki. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, gagasan, dan kritik terhadap sesuatu. dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan betapa rumit dan beragam kebutuhan manusia. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa keinginan seseorang yang terjelma dari berbagai kebutuhan dasar diatas berbeda satu sama lain. Hal itu dikarenakan keinginan individual adalah masalah yang sangat sukar sebab selain bersumber pada kebutuhan dasar juga dipengaruhi oleh banyak faktor intern yang lebih dalam (seperti : watak, kepribadian, pengalaman, dan lain-lain) dan juga faktor-faktor ekstern seperti

kondisi budaya dimana seseorang berada, sistem masyarakat bahkan kondisi geografis.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa motivasi dalam diri dapat mempengaruhi seseorang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang diinginkan walaupun bertentangan dengan norma maupun hukum yang berlaku. Hal itu dikarenakan seseorang selalu memiliki alasan-alasan tertentu dalam mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan sesuatu yang dirasa itu benar dan harus dilakukan agar keinginan dan harapannya tercapai. Dampak dari motivasi dalam diri seseorang dapat dilihat pada perilaku yang ditampilkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada fenomena *money politics* yang tidak pernah jauh dari ajang Pemilihan Kepala Desa. Walaupun kita mengetahui bahwa itu perbuatan melanggar hukum, baik yang menerima ataupun pemberi tetapi masih dilestarikan ditengah masyarakat sampai saat ini, terutama pada masyarakat kelas bawah yang mudah untuk terpengaruh oleh praktik illegal tersebut.

Kesadaran politik masyarakat kelas bawah dinilai sangat rendah dan kurang, hal itu terlihat dari munculnya berbagai anggapan dalam memaknai *money politics* yang berkembang saat Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat kelas bawah memiliki alasan tersendiri mengapa mereka terlibat dalam bisnis suara rakyat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab tersebut. Alasan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran masyarakat dan motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang dirasa benar dan harus dilakukan. Mereka cenderung berfikir pendek dan mengabaikan dampak buruk jangka panjang dari praktik *money politics* saat Pemilihan Kepala Desa.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, Pemilihan Kepala Desa pada dasarnya adalah ajang persemaian demokrasi yang mengedepankan pilihan sesuai hati nurani rakyat tanpa paksaan, adanya kompetisi yang sehat antara calon Kepala Desa, setiap calon tidak menggunakan tindakan paksaan, praktek rekayasa, dan manipulasi serta berorientasi membangun desa. Namun realitas sosial yang ada menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa tidak pernah jauh dari praktik *money politics*, bahkan telah menjadi budaya dan dilestarikan oleh masyarakat luas. Masyarakat cenderung menjadikan praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan keharusan di setiap ajang Pemilihan Kepala Desa. Jika diamati lebih jauh, masyarakat cenderung menutup mata mereka dengan imbalan yang diberikan oleh para calon Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab tanpa berfikir panjang akan dampak yang ditimbulkan.

Praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Desa tidak menutup kemungkinan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dikarenakan *money politics*

saat menjelang Pemilihan Kepala Desa bersifat menyeluruh, keputusannya kembali pada masyarakat sendiri yang menentukan dan menilai mau terpengaruh atau tidak. Namun faktanya, dengan berbagai kekurangan yang dimiliki, masyarakat kalangan bawah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terpengaruh dalam praktik tersebut. Tingkat kesadaran politik masyarakat kelas bawah sangat rendah jika dibandingkan dengan lapisan lain, mereka memiliki alasan tersendiri yang bersumber dari pemikiran-pemikiran dan anggapan-anggapan yang dimiliki terhadap kenyataan yang ada serta di dorong oleh motivasi dari dalam diri untuk terlibat didalamnya.

Pemikiran-pemikiran dan anggapan-anggapan yang dimiliki oleh seseorang berhubungan erat dengan pemaknaan seseorang tersebut pada suatu hal. Apapun pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti halnya pada masyarakat kelas bawah yang nyatanya memiliki masalah dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya dan segala keterbatasan lainnya yang mendukung mereka terlibat dalam praktik *money politics*. Fenomena tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesadaran politik masyarakat kelas bawah, karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan. Dinamika politik seperti yang dijelaskan di atas terjadi pada masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan dapat dianalisis menggunakan teori motivasi Abraham Maslow yang mendekatkan pada hierarki kebutuhan manusia dalam hidupnya. Jika dianalisis menggunakan teori motivasi Abraham Maslow fenomena *money politics* pada masyarakat kelas bawah Desa Sumberejo hanya mengacu pada kebutuhan manusia yang paling dasar atau fisiologis, dimana kebutuhan dalam mencukupi kebutuhan hidup yang paling pokok. Setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dalam hidupnya, seperti : makan, minum, dan lain-lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sebab penelitian ini bermaksud untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomenologi adalah instrumen untuk memahami lebih jauh hubungan antara kesadaran individu dan kehidupan sosialnya.

Dalam penelitian ini yang dicari bukan hanya kebenaran yang ada di lapangan, melainkan mencari pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai makna *money politics* pada masyarakat kelas bawah dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tanpa

mempengaruhi subjek penelitian serta memahaminya dari sudut pandang mereka sendiri. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi Abraham Maslow (teori motivasi). Secara metodologis alasan dipilihnya pendekatan tersebut karena didalam pendekatan fenomenologi pandangan berpikir yang digunakan lebih berpusat pada kenyataan kehidupan sehari-hari manusia dalam pemenuhan (pemuasan) kebutuhan yang bercirikan pertumbuhan dan pengembangan individu dalam hidupnya.

Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna suatu konsep atau fenomena pengalaman serta didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini dilakukan secara alami, sehingga tidak ada batasan bagi masyarakat kelas bawah dalam memaknai atau memahami *money politics*. Pada dasarnya pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasanya disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena yang diteliti agar mengerti dan paham tentang apa yang dikatakan/dimaksud oleh informan pada saat penelitian ke lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan melibatkan empat Dusun, yaitu Dusun Kaotan, Dusun Sawo, Dusun Plandi, Dan Dusun Dampit. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sejak penelitian awal (pembuatan proposal) pada bulan Maret 2013 sampai dengan apa yang telah peneliti kehendaki tercapai secara keseluruhan dan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang (masyarakat kelas bawah) Desa Sumberejo. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *judgement sampling* (sampel pertimbangan), yaitu pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang mana yang layak dijadikan sebagai informan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada, maka dibutuhkan adanya spesifikasi kriteria orang-orang yang dapat dijadikan sebagai informan. Berdasarkan uraian diatas maka kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Penduduk asli Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, 2) Termasuk masyarakat lapisan bawah kelas bawah (sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik), 3) Menjadi sasaran atau terlibat dalam praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo, 4) Memiliki

pengetahuan dan tahu mengenai masalah yang sedang diteliti, 5) Usia 17 tahun keatas (sudah memiliki hak pilih), dan 6) Sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diwawacarai.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut : 1) Observasi, teknik pengumpulan data observasi yang dilakukan disini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai subjek penelitian dalam melakukan aktivitasnya dan mengamati pola pemikiran politik masyarakat kelas bawah dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa mempengaruhinya, maka dapat diperoleh hasil penelitian lapangan yang riil dan sesuai dengan fakta mengenai kenyataannya tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan, 2) Wawancara, teknik pengumpulan data wawancara yang digunakan disini adalah wawancara bebas terpadu (terpimpin), yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview, peneliti membawa instrumen wawancara atau pedoman wawancara yang hanya melaporkan garis besar tentang hal yang ditanyakan, selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan sendiri tanpa keluar dari tujuan penelitian yang sebenarnya. 3) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dokumentasi bermanfaat untuk memperkuat hasil penelitian dan membantu memahami obyek penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini teknik dokumentasi bisa berupa pengumpulan foto, data-data mengenai geografi, dokumen pemerintah atau swasta, catatan harian, dan lain sebagainya.

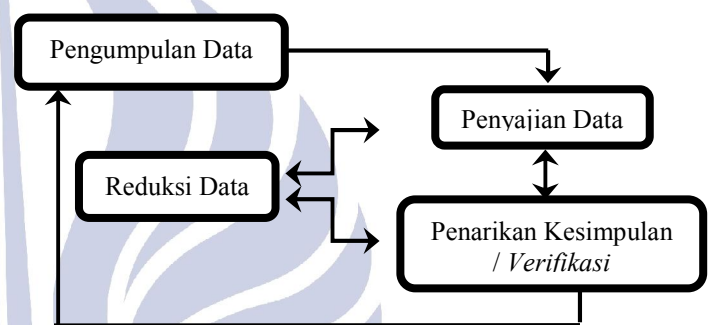
Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman harus melalui tahapan-tahapan berikut : 1) Pengumpulan data adalah rangkaian pembuktian akan suatu temuan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang, diawali dengan memasuki lokasi penelitian dan selanjutnya baru mencari informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data, 2) Reduksi data adalah pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2009:249), 3) Penyajian data adalah setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman, dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2009:249), dan 4) Penarikan kesimpulan (*verifikasi*) adalah langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Penarikan kesimpulan adalah suatu proses mengambil keputusan dari kategori data yang telah direduksi dan kemudian disajikan untuk ditampilkan dalam kesimpulan akhir yang berguna untuk membentuk pemecahan permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada (Sugiyono, 2009:253).

Gambaran model interaktif ini adalah sebagai berikut :

Bagan 1

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



HASIL PENELITIAN

Warga Desa Sumberejo yang dijadikan informan dalam penelitian ini terdapat 8 orang yang berasal dari empat Dusun berbeda, berasal dari kalangan kelas bawah dan memiliki pekerjaan yang berbeda pula. Data yang diperoleh dari informan telah melalui berbagai proses pengamatan serta terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan data antara informan satu dengan informan yang lainnya. Penelitian ini menghasilkan berbagai pemaknaan akan *money politics* pada masyarakat kelas bawah dan faktor-faktor penyebab masyarakat kelas bawah menerima *money politics* yang diberikan oleh Sumantri, data yang dihasilkan bisa dilihat sebagai berikut :

Makna *money politics* pada masyarakat kelas bawah

Praktik *money politics* pada dasarnya adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Jika diamati praktik ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di negara kita, namun faktanya masih dilestarikan oleh masyarakat terutama pada ajang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Pemaknaan terhadap *money politics* itu sendiri pada dasarnya muncul dari pemikiran-pemikiran dan anggapan-anggapan yang dimiliki masyarakat kalangan kelas bawah terhadap kenyataan yang ada disekitarnya serta di dorong oleh motivasi dari dalam diri untuk terlibat didalamnya.

Tingkat kesadaran politik masyarakat kalangan kelas bawah juga dapat berpengaruh pada pola pikir politik mereka.

Sripen (52 tahun) adalah salah satu warga Desa Sumberejo yang termasuk dalam kalangan kelas bawah. Sripen mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Menurutnyanya dengan adanya fenomena *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarganya, jadi Sripen memaknai permainan *money politics* itu sebagai rejeki yang tidak terduga. Berikut pernyataan Sripen saat diwawancara :

“Emmh... kalau menurut saya adanya praktik money politics menjelang Pemilihan Kepala Desa itu merupakan berkah tersendiri untuk orang-orang yang hidupnya serba kekurangan seperti saya mbak... Dengan adanya bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh Sumantri sedikit banyak dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup, apalagi dengan hanya mengandalkan penghasilan becak saja kadang-kadang kurang bisa mengenyangkan perut keluarga saya. Belum juga menyekolahkan anak saya yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar yang nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah, untuk membeli beras saja kami kesusahan. Biaya sekolah jaman sekarang sangat mahal untuk ukuran kami. Toh yang harus saya lakukan hanya memilihnya menjadi Kepala Desa yang baru. Jadi ya uang yang keluarga kami terima saya anggap rejeki yang tidak terduga untuk menyambung hidup kami sehari-hari...”

Jika ditanya mengapa dirinya memaknai *money politics* sebagai rejeki yang tidak terduga padahal hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum, jawaban yang ia ungkapkan sebenarnya Sripen sadar bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang ada tetapi kebutuhan menyambung hidup lebih penting bagi Sripen sekeluarga. Adanya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang membuatnya memaknai *money politics* hanya sebatas sebagai rejeki yang tidak terduga. Berikut pernyataan Sripen saat diwawancara :

“... Sebenarnya saya mengerti mbak kalau money politics itu melanggar hukum, tapi kalau saya mikir jauh kesana sama saja saya menolak rejeki. Jarang-jarang juga saya menerima rejeki yang tidak terduga seperti ini, yang terpenting kan kami dapat menyambung hidup dan bisa makan. Kalau yang urusan lain-lain itu urusannya orang-orang besar sana, saya diberi ya saya terima

dengan senang hati toh itu bermanfaat untuk saya sekeluarga.”

Pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh Ninik (36 tahun), Ninik mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Menurut Ninik adanya praktik *money politics* pada setiap Pemilihan Kepala Desa dapat membantu perekonomian keluarganya. Ninik memaknainya sebagai tambahan rejeki. Berikut pernyataan Ninik saat diwawancara :

“... Bagi saya money politics itu merupakan tambahan rejeki untuk keluarga saya mbak... Kan money politics itu membagi-bagikan uang atau sembako sebagai bentuk penyuapan agar kita bersedia memilih, jadi yang bisa saya lakukan hanya memilih calon yang membantu saya. Semenjak suami saya meninggal dunia, saya sendiri yang mencarikan nafkah untuk anak-anak saya. Untuk menyambung perekonomian keluarga dan melanjutkan pendidikan anak-anak, saya terpaksa menjadi pembantu rumah tangga karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Pendapatan yang saya peroleh setiap bulan tidak cukup untuk makan dan mencukupi kebutuhan lainnya. Barang-barang elektronik peninggalan suami saya banyak yang terpaksa terjual demi anak-anak agar dapat melanjutkan sekolah dan nantinya nasib mereka tidak seperti orang tuanya.”

Ninik sangat terbuka pada praktik yang sudah menjadi budaya dalam setiap Pemilihan Kepala Desa tersebut walaupun Ninik paham kalau praktik tersebut sebenarnya dilarang dalam sebuah kampanye. Alasannya menerima *money politics* karena ia dan keluarganya sedikit banyak merasa terbantu. Berikut pernyataan Ninik saat diwawancara:

“Saya paham lo mbak kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilihan Kepala Desa. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.”

Kadir (47 tahun), mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Menurutnyanya *money politics* merupakan rejeki nomplok dan harus ada dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Desa karena dapat membantu masyarakat kalangan bawah sepertinya. Berikut pernyataan Kadir saat diwawancara :

“... Saya senang sekali mbak jika menerima uang dari calon Kepala Desa yang

mencalonkan diri, walaupun tidak banyak bagi saya itu merupakan rejeki nomplok. Malah saya berharap setiap hari ada Pemilihan Kepala Desa. Bayangkan saja mbak saya hanya penjual balon plastik keliling yang berpenghasilan minimal Rp. 8000 perhari sedangkan saya harus memberi uang belanja istri saya untuk makan setiap hari. Tambahan yang saya peroleh ya dari anak saya yang bekerja di luar Jawa, tetapi mengirimnya hanya sebulan sekali itu pun cukup untuk membayar listrik dan keperluan lainnya. Jadi ya saya merasa terbantu dengan adanya bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh Sumantri ini.”

Jika ditanya alasan mengapa dirinya terlibat dalam praktik terlarang tersebut padahal itu merupakan larangan dalam sebuah kampanye Kadir hanya menjawab karena ia butuh uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kadir mengerti kalau praktik tersebut terlarang dan ia sadar perbuatan tersebut berhubungan dengan hukum tetapi banyaknya warga sekitar yang juga terlibat sehingga membuatnya tidak takut. Baginya melanjutkan hidup lebih penting daripada memikirkan politik yang nyatanya tidak ia pahami. Berikut pernyataan Kadir saat diwawancara :

“... Iya mbak memang perbuatan itu dilarang untuk dilakukan oleh para calon Kepala Desa dalam kampanyenya, tapi saya juga butuh uang untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Jadi ya menurut saya itu rejeki nomplok. Kalau tidak dilarang tidak mungkin juga proses transaksinya berjalan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh calon Kepala Desa yang lain. Kan money politics itu melanggar hukum sebenarnya, saya sadar itu. Tapi kan banyak temannya, warga sini juga banyak yang menerima. Orang kecil seperti kami ini yang dipikirkan ya hanya melanjutkan hidup, daripada memikirkan politik yang tidak kami pahami.”

Alasan yang sama diungkapkan oleh Suwarni (54 tahun), Suwarni mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Bagi Suwarni *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa merupakan bonus rutin di setiap ajang Pemilihan Kepala Desa dan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat terlebih pada masyarakat kalangan kelas bawah yang serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Berikut pernyataan Suwarni saat diwawancara :

“... Sepertinya itu bukan rahasia lagi mbak... kok menurut saya itu sudah dianggap keharusan di masyarakat. Apalagi

masyarakat yang hidupnya kekurangan seperti saya, yang ditunggu-tunggu saat Pemilihan Kepala Desa ya bagi-bagi uang dan sembakonya. Dengan menerima uang dan sembako saya bisa terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang sudah menjadi bonus rutin setiap Pemilihan Kepala Desa. Ada rejeki lebih saat menjelang Pemilihan Kepala Desa ya saya anggap bonus rutin untuk keluarga kami saja lah...toh ekonomi keluarga saya terbantu.”

Adanya rejeki yang datang menjelang Pemilihan Kepala Desa dianggap Suwarni sebagai bonus rutin, alasannya karena menguntungkan dan bermanfaat baginya walaupun ia sadar bahwa praktik tersebut dilarang. Pemikiran Suwarni hanya sebatas pada materi dan keberlangsungan hidup, ia kurang memahami dunia politik yang sebenarnya. Berikut pernyataan Suwarni saat diwawancara :

“... Ya itu tadi mbak, alasan mengapa saya memaknainya sebagai bonus rutin setiap Pemilihan Kepala Desa karena saya merasa diuntungkan dan merasakan manfaat menerima money politics tersebut walapun saya sadar kalau praktik itu dilarang. Setahu saya cuma itu saja kalau ditanya mengenai masalah politik lebih dalam itu saya tidak paham, bagi saya yang penting bisa belanja kebutuhan sehari-hari dengan adanya rejeki dari adanya money politics yang saya terima dari Sumantri itu.”

Suana (45 tahun) memiliki pemikiran yang berbeda akan *money politics*. Suana mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Jika ditanya mengenai *money politics* Suana memaknainya sebagai tradisi turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang jadi harus dilestarikan karena banyak membantu semua pihak. Baik itu yang memberi maupun yang menerima. Berikut pernyataan Suana saat diwawancara :

“... Itu sih sudah tradisi mbak di masyarakat setiap Pemilihan Kepala Desa... dari dulu hingga sekarang. Hal itu sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah saja ada money politics apa lagi Pemilihan Kepala Desa. Hal itu juga terjadi di Desa lain mbak bukan di Desa ini saja. Kalau menurut saya masyarakat itu sudah terbiasa dengan hal seperti ini, malah kadang ada calon Kepala Desa yang tidak membagi-bagikan uang akan dijadikan omongan ditengah masyarakat. Praktik

semacam ini sebaiknya dilestarikan masyarakat karena banyak membantu semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima.”

Sebenarnya Suana paham jika perbuatannya melanggar hukum tetapi ia menganggapnya bukan merupakan hal yang serius. Alasannya ia hanya sebagai generasi penerus yang nyatanya merasa terbantu dengan adanya *money politics* tersebut. Ia mengakui bahwa dirinya tidak melek politik, baginya *money politics* adalah tradisi turun temurun yang harus terus dilestarikan. Berikut pernyataan Suana saat diwawancara :

“... Ya karena saya menganggapnya sebagai tradisi pada Pemilihan Kepala Desa. Dinamakan tradisi karena terus menerus berkelanjutan dari waktu ke waktu saat menjelang pemilihan. Sekarang mana ada Pemilihan Kepala Desa yang jauh dari money politics mbak... di setiap desa pasti ada. Saya tahu kalau money politics itu dilarang tapi itu nyatanya tidak menjadi ancaman kan di masyarakat. Semua orang yang menerima money politics pasti akan lebih merasa terbantu, kalau masalah politik saya tidak begitu paham. Saya hanya bertindak sebagai generasi penerus yang merasakan manfaat dan ikut terbiasa dengan adanya money politics.”

Pemikiran yang berbeda muncul dari Rohman (49 tahun), Rohman mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Baginya dengan cara memilih calon yang memberinya uang Rohman bisa membalas bantuan yang telah diberikan Sumantri pada keluarganya. Jadi hanya dengan memilihnya saat Pemilihan Kepala Desa diyakini bisa menjadi fasilitasnya untuk balas budi. Rohman memaknai *money politics* pada saat Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang balas budi. Berikut pernyataan Rohman saat diwawancara :

“... Mbak kan tahu sendiri saya ini orang nggak punya, untuk makan sehari-hari saja saya harus menguras keringat. Apalagi belum musim panen seperti ini membuat saya semakin sulit untuk mendapat uang. Saya beranggapan bahwa money politics itu adalah jembatan kita untuk membalas budi. Karena Sumantri ingin menang ia memberi saya uang dan saya membalasnya dengan memberikan dukungan dengan cara mencoblosnya saat pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang baru. Yang bisa saya lakukan ya jelas hanya itu karena saya saja tidak punya apa-apa untuk membalasnya.

Apalagi calonnya adalah tetangga sendiri, jadi kalau mengurus sesuatu tidak jauh-jauh dan pasti lebih dipermudah.”

Baginya Rohman budi pada orang lain apalagi tetangganya sendiri lebih penting walaupun ia mengetahui jika perbuatannya yang seperti itu melanggar hukum yang ada. Rohman juga mengakui jika sudah dari dulu ada fenomena seperti ini tetapi tidak ada penanganan sehingga berlanjut sampai sekarang. Ajang demokrasi yang sejatinya mengutamakan aspirasi murni pilihan hati nurani dicemari oleh adanya upaya balas budi antar sesama. Berikut pernyataan Rohman saat diwawancara :

“... Alasan saya memaknai money politics sebagai ajang balas budi ya soalnya bagi saya membalas budi orang yang membantu kita itu lebih penting mbak... apalagi tetangga sendiri, kalau ada apa-apa yang pertama kali membantu ya tetangga sekitar. Saya ya paham kalau melanggar hukum tapi sebelumnya kan juga banyak kasus seperti ini tetapi tidak ada apa-apa sehingga terus berlanjut sampai sekarang.”

Agus (41 tahun) mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Bagi Agus praktik *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu perjanjian kerjasama atau kontrak antara Agus dengan calon Kepala Desa yang memberinya uang. Menurutnya tindakan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berikut pernyataan Agus saat diwawancara :

“... Apa ya mbak ?? kalau saya sih lebih memaknainya sebagai perjanjian kerjasama. Bisa dibilang seperti kontrak begitulah... siapa pun calon Kepala Desa yang memberi saya uang atau bentuk materi lainnya pasti saya coblos kalau tidak ya tidak saya coblos. Jadi kalau menguntungkan kedua pihak kenapa enggak... Kan memang money politics itu kita diberi uang atau materi yang lain lalu kita pun harus membalasnya dengan memilih calon tersebut untuk menjadi Kepala Desa yang baru. Toh... sama-sama menguntungkan buat kami berdua.”

Hampir semua informan paham jika praktik *money politics* itu dilarang tetapi sama saja dengan yang lain, bagi Agus fenomena tersebut tidak bisa dijauhkan dari kehidupan mereka karena terus ada ditengah masyarakat. Kecuali tidak ada atau bahkan dihilangkan dari kebiasaan masyarakat. Berikut pernyataan Agus saat diwawancara :

“...Saya tahu kalau melanggar hukum tetapi tentunya masyarakat juga kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan terlarang itu

karena terus ada ditengah masyarakat fenomena tersebut kecuali kalau tidak ada dari dulu fenomena itu atau dihilangkan. Masyarakat juga tidak ada pilihan lain untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Mereka pasti tidak akan berfikir panjang, ada rejeki ya diterima. Begitu pula dengan yang saya fikirkan tapi saya lebih suka menganggapnya sebagai perjanjian kerjasama tidak tahu kalau anggapan orang lain.”

Sependapat dengan pemikiran Agus, Agung (33 tahun), Agung mengaku menerima dan memilih calon Kepala Desa yang melakukan *money politics*. Agung menganggap praktik *money politics* tersebut sebagai ajang tolong-menolong. Karena Agung merasa ditolong maka ia juga ingin berbalik menolong dengan cara memilihnya menjadi calon Kepala Desa yang baru. Berikut pernyataan Agung saat diwawancara :

“... Money politics saat Pemilihan Kepala Desa... mungkin itu merupakan fenomena yang dijadikan masyarakat sebagai penyebab mereka saling tolong-menolong antara calon Kepala Desa yang punya duit dengan orang-orang yang terpengaruh olehnya. Seperti saya yang jujur saja bersedia mencoblos Sumantri yang melakukan money politics, karena saya merasa ditolong dalam hal materi. Tapi memang sudah rahasia umum ya mbak praktik semacam itu. Walaupun transaksinya masih saja dengan diam-diam agar tidak diketahui oleh calon Kepala Desa yang lainnya.”

Kesadaran Agung akan larangan hukum diabaikannya demi materi karena walaupun dilarang tetapi tidak ada konsekwensi yang akan ia terima. Sistem demokrasi yang sesungguhnya dikalakan oleh tuntutan atau dorongan dari dalam diri untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Berikut pernyataan Agung saat diwawancara :

“... Kalau berpikir lebih mengutamakan larangan yang ada tetapi tidak ada hukuman dengan melanjutkan hidup dengan mensyukuri rejeki yang datang ya saya lebih memilih melanjutkan hidup dengan mensyukuri rejeki. Karena tuntutan dalam hidup saya adalah melanjutkan hidup yang lebih baik. Kalau hukumnya benar-benar ditegakkan dengan baik pasti masyarakat juga akan menjauhi praktik tersebut. Maka jika ia membantu saya mencukupi kebutuhan maka saya juga membantunya dengan mendukungnya saat pemilihan. Kodratnya

manusia kan saling tolong-menolong antar sesama.”

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa masyarakat kalangan bawah memiliki kesadaran politik yang rendah dalam memaknai praktik *money politics*. Hal itu terlihat dari munculnya beragam pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat kalangan bawah, seperti : sebagai rejeki yang tidak terduga, tambahan rejeki, rejeki nomplok, bonus rutin, tradisi turun-temurun, ajang balas budi, perjanjian kerjasama atau kontrak, dan ajang tolong-menolong.

Faktor penyebab masyarakat *lower class* menerima *money politics*

Praktik *money politics* merupakan perbuatan melanggar hukum walaupun dalam jangka pendek dapat membantu masyarakat kalangan kelas bawah yang turut mencicipi. Praktik ini jelas membuat masyarakat mengalami kerugian ganda yaitu hilangnya kesempatan mendapatkan pemimipin atau Kepala Desa yang berkompeten melalui demokrasi dan rusaknya moralitas bangsa secara tidak langsung. Membudayanya praktik *money politics* saat menjelang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo pada masyarakat kelas bawah bersumber dari beberapa faktor yang memotivasi masyarakat untuk tepengaruh didalamnya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sripin (52 tahun) bahwa faktor yang menyebabkan ia bersedia untuk menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa dan bersedia memilih calon tersebut menjadi Kepala Desa yang baru karena adanya desakan dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Berikut pernyataan Sripin saat diwawancara :

“...Mungkin yang membuat saya bersedia menerima money politics dari Sumantri dan memilihnya sebagai Kepala Desa yang baru karena adanya desakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Yang terlintas dalam pikiran saya saat menerima money politics tersebut ya hanya manfaatnya saja yang bisa saya peroleh mbak dan tidak pernah terpikirkan resiko yang bisa saya dapatkan dari tindakan yang terlarang ini nantinya. Tentunya berbeda dengan cara berpikir orang yang berkecukupan, karena mereka tidak bingung berpikir untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga mereka memiliki banyak waktu dalam memutuskan bersedia menerima atau tidak. Adanya praktik semacam ini kan berkah bagi kami, karena penghasilan yang saya peroleh bisa digunakan untuk

membayar sekolah anak atau untuk memenuhi kebutuhan yang lain.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ninik (36 tahun), ia mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkannya menerima *money politics* dari salah satu calon Kepala Desa karena Ninik merasa terbantu dalam hal ekonomi keluarga. Keterbatasan ekonomi yang sedang dialami Ninik sekeluarga menyebabkan dirinya menganggap praktik *money politics* adalah perbuatan yang halal-halal saja untuk dilakukan. Berikut pernyataan Ninik saat diwawancara :

“... Kalau menurut saya lebih kearah ekonomi ya mbak... jadi saya merasa terbantu saja dalam hal ekonomi keluarga, tidak munafik juga semua orang didunia pasti membutuhkan uang. Apalagi keluarga yang ekonominya serba kekurangan seperti saya. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya terbuka kok pada money politics karena sejauh ini praktik tersebut membawa tambahan rejeki bagi kami.”

Faktor yang serupa juga diungkapkan oleh Kadir (47 tahun). Ia memiliki pemikiran bahwa melanjutkan hidup dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya lebih utama daripada memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia politik, hal itu mendorongnya untuk terlibat pada praktik *money politics* karena menurutnya *money politics* dapat membantu masyarakat kelas bawah yang turut mencicipi. Berikut pernyataan Kadir saat diwawancara:

“... Ya pasti karena tuntutan kebutuhan mbak, zaman sekarang mana ada orang yang diberi uang menolak. Mungkin berbeda pada orang-orang yang kaya yang paham masalah politik. Bagi kami melanjutkan hidup sehari-hari dan dapat mencukupi kebutuhan lebih utama daripada memikirkan masalah politik, karena jujur saja saya tidak paham masalah politik. Menurut saya money politics sejatinya dapat membantu masyarakat miskin yang turut mencicipi. Jadi yang mendorong saya untuk terlibat karena yang terlintas dalam pikiran kami hanya dapat menggunakan money politics tersebut untuk melanjutkan hidup dan memenuhi segala kebutuhan.”

Suwarni (54 tahun) mengungkapkan hal yang sama, bahwa faktor yang menyebabkan ia terpengaruh oleh bisnis jual beli suara rakyat tersebut karena setiap orang pasti menginginkan kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi. Lingkungan sekitar juga mendukungnya untuk menerima praktik terlarang tersebut. Berikut pernyataan Suwarni saat diwawancara :

“... Emmhh... mungkin tercukupinya kebutuhan saya sekeluarga itu ya mbak yang membuat saya mudah terpengaruh untuk menerima uang dari Sumantri. Namanya saja manusia kan tidak bisa jauh dari lingkungan sekitarnya, walaupun saya menolak tapi lingkungan sekitar saya mendukung ya pasti saya ikut terpengaruh. Lumayan juga dapat meringankan dalam upaya melengkapi kebutuhan sehari-hari saya sekeluarga, maka tidak mengherankan jika praktik money politics tersebut ditunggu-tunggu oleh masyarakat setiap ada Pemilihan Kepala Desa. Kalau tidak memberi manfaat buat apa juga masih dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat.”

Menurut Suana (45 tahun), penyebab ia terpengaruh oleh praktik *money politics* dan menjadi korban dari bisnis suara rakyat tersebut bukan karena faktor ekonomi tetapi karena praktik ini sudah membudaya di tengah masyarakat pada umumnya. Berikut pernyataan Suana saat diwawancara :

“... Sebenarnya tidak ada alasan yang mendorong saya untuk bersedia menerima dan memilih calon yang memberi saya uang dan sembako tersebut mbak, tapi itu memang sudah membudaya didesa kami setiap menjelang Pemilihan Kepala Desa. Hal itu sudah biasa. Itu kan memang sudah upaya para calon Kepala Desa jika ingin menang, wong masyarakat yang memilih mereka jadi mereka harus pintar juga mengambil hati kami... ya dengan cara tradisi turun-temurun bagi-bagi uang tadi. Kalau bahaya yang bisa timbul akibat dari membudayanya praktik money politics tersebut saya tidak paham itu mbak.”

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Rohman (49 tahun), baginya alasan yang menyebabkan ia menerima *money politics* dan terpengaruh untuk menyerahkan suaranya karena Rohman mengaku mengenal dekat calon yang memberinya uang tersebut. Berikut pernyataan Rohman saat diwawancara :

“... Yang memberi tetangga dekat saya sendiri ech mbak... jadi hitung-hitung saya balas budi lah mbak karena sudah diberi rejeki. Saya itu orangnya paling gak bisa kalau ditolong tanpa balas budi dengan orang yang sudah menolong saya, apalagi tetangga dekat saya sendiri. Walaupun nanti terpilih menjadi Kepala Desa yang baru kan saya juga ikut senang sebagai tetangga.

Kalau ditanya masalah-masalah politik nggak tahu saya mbak dan nggak pengen tahu, binggung...”

Agus (41 tahun) mengungkapkan pendapat yang sama, menurutnya hal yang memotivasi dirinya menerima *money politics* dan terlibat karena adanya kontrak perjanjian yang memaksa untuk terlibat. Berikut pernyataan Agus saat diwawancara :

“... Yang menyebabkan mungkin ya adanya tukar-menukarnya itu tadi mbak. Kontrak kerjasama antara saya dengan Sumantri yang membuat saya terpengaruh untuk menerima dan mencoblosnya. Dengan adanya perjanjian kerjasama antara calon tersebut dengan saya itu kan membuat kita sama-sama diuntungkan. Kalau saya tidak mendapat untung ya saya tidak mau mencoblosnya, urusan bagaimana kemampuannya memimpin itu urusan belakang karena bisa dilatih menjadi lebih baik.”

Agung (33 tahun) mengaku penyebab ia bersedia menerima karena dorongan dari hatinya untuk saling tolong-menolong. Agung merasa tertolong dengan adanya *money politics* jadi ia juga ingin menolong Sumantri yang memberinya uang dengan cara dipilih menjadi Kepala Desa Sumberejo yang baru. Berikut pernyataan Agung saat diwawancara :

“... Saya terpengaruh karena hati saya itu terdorong untuk menolong. Karena kami ditolong dengan diberi uang dan sembako jadi saya juga ingin menolong dengan cara mencoblosnya saat pemilihan. Sebenarnya saya tidak minta untuk ditolong tapi kalau saya diberi ya saya terima, kan saya juga butuh uang. Itung-itung itu rejeki, yang menerima juga banyak bukan saya saja. Yang saya pikirkan hanya itu ech mbak, masalah lebih dalam mengenai politik itu saya tidak tahu.”

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat kelas bawah bersedia menerima dan terlibat dalam praktik *money politics* yang dilakukan oleh Sumantri, antara lain yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dikenal sebagai bentuk sistem demokrasi di tingkat desa. Ajang Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian kecil dari wujud negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi. Kekuasaan dan kedudukan politik yang diraih melalui proses demokrasi yang baik dan benar pada suatu Pemilihan Kepala Desa dapat menciptakan harmoni dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan dari suatu negara.

Demokrasi di tingkat desa merupakan bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Untuk itu praktik *money politics* yang ada dalam suatu Pemilihan Kepala Desa jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada dan memiliki dampak buruk terhadap sistem demokrasi yang berjalan. Namun, praktik tersebut cenderung membudaya dan bahkan dilestarikan ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Walaupun praktik *money politics* dalam suatu pemilihan sudah dicegah dengan berbagai cara, namun sulit untuk membersihkan sistem demokrasi Indonesia dari fenomena tersebut. Dampak yang bisa ditimbulkan dapat kita lihat pada dekadensi moral bangsa dan bidang pembangunan khususnya di Indonesia dimana prinsip-prinsip demokrasi yang murni sesuai dengan hati nurani rakyat telah dicemari dan dikendalikan oleh praktik *money politics*. Praktik tersebut sudah menjadi suatu bagian yang terintegrasi dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai sebuah fenomena yang biasa oleh masyarakat. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem demokrasi di Amerika yang sudah jauh lebih baik.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tidak pernah dapat dipisahkan dari adanya praktik *money politics*. Praktik tersebut dilakukan oleh calon Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kompetensi yang memadai sehingga mendorong untuk melakukan cara instan untuk dapat menduduki kursi pemegang jabatan tertinggi ditingkat desa tersebut. Bentuk-bentuk permainan *money politics* yang dilakukan oleh Sumantri menjelang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo meliputi pembagian uang tunai, pembagian sembako, dan sumbangan pada pembangunan fasilitas umum.

Praktik *money politics* yang terjadi melibatkan seluruh segmen masyarakat Desa Sumberejo, baik itu pada kalangan kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Namun kalangan kelas bawah menjadi target utamadalama praktik ini karena dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki dapat membuat kalangan ini mudah menerima *money politics* dan terpengaruh untuk memberikan hak pilihnya. *Money politics* yang melibatkan semua kalangan masyarakat Desa Sumberejo ini memiliki beragam makna dan perspektif dalam pemikiran serta anggapan setiap individu. Khususnya

pada masyarakat kalangan kelas bawah yang tergolong memiliki tingkat kesadaran politik yang kurang. Realitas yang ada menunjukkan bahwa, berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat kalangan kelas bawah dapat menjadi dasar pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan-anggapan politik.

Masyarakat kalangan kelas bawah memiliki alasan tersendiri yang bersumber dari pemikiran-pemikiran dan anggapan-anggapan terhadap kenyataan yang dialami serta di dorong oleh motivasi dari dalam diri untuk terlibat dan terpengaruh oleh *money politics*. Teori motivasi yang dimiliki oleh Abraham Maslow dapat membuka analisis terhadap suatu pemahaman yang secara autentik, khususnya dalam memahami makna dibalik tindakan rasional masyarakat kalangan kelas bawah di Desa Sumberejo yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam praktik *money politics*. Tindakan rasional ini merupakan tindakan yang bertujuan atas dasar rasionalitas nilai yang berlaku atau tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosional serta pemahaman dari pelaku atau informan sendiri, sehingga nantinya dapat dipahami makna dibalik fenomena *money politics* menurut masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo menjelang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan faktor penyebab masyarakat kelas bawah bersedia menerima *money politics* tanpa berfikir dampak jangka panjang yang akan diterima.

Jika dikaitkan dengan teori motivasi (hierarki kebutuhan) yang dimiliki oleh Abraham Maslow, makna *money politics* dan faktor penyebab masyarakat kelas bawah terpengaruh dalam *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan mengacu pada tingkat kebutuhan pokok manusia yang paling dasar atau fisiologis. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) merupakan kebutuhan yang sangat dasar dan mutlak harus di penuhi untuk memelihara homeostatis biologis dan kelangsungan hidup bagi setiap manusia, seperti: makan, minum, dan lain-lain. Setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dalam hidupnya. Jika dapat terpenuhi maka muncullah kebutuhan yang lebih tinggi dan jika tidak dapat terpenuhi maka terkadang ada manusia yang kehilangan kontrol terhadap perilakunya sendiri, dari sinilah kriminalitas dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum berakar. Seperti halnya dengan masyarakat kalangan kelas bawah di Desa Sumberejo yang rela menerima dan menjual suara mereka hanya karena mendapatkan uang atau materi lain dari calon Kepala Desa yang tidak berkompeten. Mereka cenderung menutup mata mereka dengan materi tanpa

memperhitungkan dampak buruk yang akan mereka terima nantinya.

Kedelapan informan dalam penelitian ini mengungkapkan jika mereka turut aktif berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa yang diadakan tanggal 19 Mei 2013 kemarin berserta alasannya dan mereka mengakui jika menerima praktik *money politics* dari Sumantri serta terpengaruh untuk memilihnya sebagai Kepala Desa Sumberejo yang baru dengan mengesampingkan aturan hukum yang ada. Mereka tidak menyadari dan tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan, meskipun dalam jangka pendek dapat membantu mereka. Masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo memiliki beragam makna dalam memaknai praktik *money politics* pada ajang Pemilihan Kepala Desa, tetapi apapun makna yang mereka bangun dan ungkapkan beserta alasan-alasannya tetap saja yang namanya aturan seharusnya ditaati dan tidak boleh dilanggar ataupun disalahgunakan. Pemaknaan tersebut antara lain yaitu : 1) sebagai rejeki tidak terduga, 2) sebagai tambahan rejeki, 3) sebagai rejeki nempel, 4) sebagai bonus rutin, 5) sebagai tradisi turun-temurun, 6) sebagai ajang balas budi, 7) sebagai perjanjian kerjasama/kontrak, dan 8) sebagai ajang tolong-menolong.

Dibalik membudayanya praktik *money politics* ditengah masyarakat, sebenarnya setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik begitu juga masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo yang menginginkan seorang Kepala Desa yang mampu membawa kearah pembangunan desa yang lebih baik bukan kearah yang lebih buruk. Untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat harus dapat memilih dan menyerahkan tanggung jawab pembangunan desa kepada orang yang tepat yaitu kepada seorang calon pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mampu membawa desa kearah kemajuan untuk dapat memberikan pemerataan kesejahteraan kepadaarganya.

Hal itu merupakan salah satu upaya yang bisa dimulai oleh warga yang mempunyai hak untuk memilih calon Kepala Desa dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki setiap calon secara rasional dan sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan, bahwa calon yang akan menjadi pemimpin desa akan mampu untuk membangun desa kearah yang lebih baik bukan memilih calon karena dipengaruhi oleh uang atau materi lainnya. Namun pesta demokrasi yang transparan sejatinya telah dirusak oleh praktik *money politics* yang seakan menjadi budaya dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Desa.

Praktik *money politics* pada setiap Pemilihan Kepala Desa yang selalu membudaya di tengah masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo membuat munculnya kekhawatir akan keberlangsungan

demokratisasi khususnya di Indonesia. Masih jarang masyarakat Indonesia yang memilih calon Kepala Desa memang benar-benar didasarkan pada *track record* atau program yang ditawarkan dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan pemerintahannya. Masyarakat cenderung kurang berpikir panjang mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Desa nyatanya sudah menjadi sesuatu yang biasa, umum dan bahkan suatu keharusan.

Secara ekonomis dalam jangka pendek praktik *money politics* dapat membantu masyarakat kalangan kelas bawah yang turut mencicipi. Namun tidak menutup kemungkinan semua tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomi tersebut dapat mengorbankan tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan negara demokrasi dan meningkatkan moralitas bangsa menjadi lebih baik. Dari hasil wawancara dengan kedelapan informan telah diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan secara mendalam bahwa sebenarnya masyarakat kelas bawah tidak tahu akan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh *money politics* tetapi praktik tersebut masih dilestarikan sampai sekarang. Ada akibat karena ada sebab, begitu juga permasalahan yang satu ini, pasti ada penyebab atau latar belakang dari masih dilestarikannya *money politics* di setiap Pemilihan Kepala Desa walaupun telah mencoreng esensi nilai-nilai demokrasi. Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat bersedia menerima uang atau materi lainnya yang diberikan oleh salah satu calon Kepala Desa yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentunya hal itu tidak pernah jauh dari kodrat manusia yang tidak pernah cukup, pada kenyataannya memang manusia sangat menyukai uang sebab itulah kebutuhan pokok manusia dalam hidupnya.

Mudahnya menerima *money politics* yang diberikan oleh Sumantri merupakan bukti bahwa masyarakat kelas bawah tidak menghargai dan mengerti arti dari demokrasi yang sesungguhnya. Tentunya ada faktor penyebab yang membuat masyarakat kelas bawah sangat mudah terpengaruh dalam praktik *money politics*, padahal kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi bangsa dan negara. Dalam dunia politik nyatanya materi dapat mempengaruhi bahkan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Setelah dilakukan observasi dan wawancara dilapangan ternyata faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa antara lain yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor pendidikan, 3) faktor tradisi, dan 4) faktor kesempatan.

Pertama, Faktor Ekonomi → Ternyata sebagian masyarakat kelas bawah selalu mengharapkan ajang

Pemilihan Kepala Desa karena dapat membantu mereka secara ekonomi. Tingkat kesadaran politik mereka yang rendah secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam menyalurkan suara. Hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa seseorang yang mapan secara finansial atau ekonomi mempunyai banyak waktu luang untuk memikirkan masalah politik dibandingkan seseorang yang mempunyai masalah ekonomi yang kesehariannya dihabiskan dengan hanya memikirkan masalah mencari makan dan menjaga kelangsungan hidup saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita sekarang ini masih banyak yang hidup dalam kekurangan materi bahkan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya saja kesulitan, khususnya masyarakat kalangan kelas bawah di Desa Sumberejo yang mayoritas penduduknya bekerja keras terlebih dahulu dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup merupakan tuntutan yang menyebabkan mereka mudah melakukan segala hal walaupun itu salah, seperti menerima dan terpengaruh oleh praktik *money politics* saat menjelang Pemilihan Kepala Desa. Disini masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Hal ini terlihat dari banyaknya informan yang memaknai *money politics* hanya sebatas pada faktor ekonomi yang menghimpit.

Penghasilan yang mereka peroleh masih dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, sehingga mereka bersedia menerima uang atau materi lain untuk ditukarkan dengan suara mereka karena uang yang mereka peroleh tersebut bisa digunakan sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bukan hanya menerima *money politics* tetapi ternyata mereka juga bersedia memilih calon yang memberinya uang tanpa berfikir panjang akan dampak yang bisa ditimbulkan. Berawal dari itu dapat kita lihat bahwa uang merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat, terutama masyarakat kalangan kelas bawah seperti yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Kedua, Faktor Pendidikan → Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kesadaran politiknya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur, termasuk pada masalah pemilihan calon Kepala Desa. Berbeda dengan masyarakat kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengabaikan dan buta akan masalah politik. Hal itu berhubungan dengan faktor ekonomi seseorang, jika seseorang tersebut dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang rendah maka seseorang tersebut tidak dapat mengusahakan untuk

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akibatnya kurangnya pengetahuan yang dimiliki.

Pendidikan sangat penting dalam faktor penyebab masyarakat menerima *money politics* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuan masyarakat yang luas dapat membantu untuk membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar sehingga setiap melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan secara rasional begitu pula dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa dengan memilih calon yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan pemerintahan desa.

Sebenarnya dengan tingkat pendidikan masyarakat kelas bawah yang tinggi dan pengetahuan yang benar akan *money politics* dapat membantu mereka untuk mempertimbangkan keputusan yang akan di ambil terhadap maraknya praktik *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa. Namun nyatanya pengetahuan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo terhadap *money politics* sangat rendah akibat tingkat pendidikan yang rendah pula sehingga muncullah pemikiran yang salah mengenai *money politics*.

Ketiga, Faktor Tradisi → Di Desa Sumberejo, praktik *money politics* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa dalam proses menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seakan sudah menjadi rahasia umum, dimana bagi masyarakat calon yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tertinggi ditingkat desa, sementara bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia bagus dan memiliki kompetensi yang memadai tapi tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan.

Kebiasaan membagi-bagikan uang atau sembako itu, memang sulit untuk dihilangkan dan di jauhkan dari kehidupan masyarakat, karena hampir semua masyarakat kita sudah terbiasa pada fenomena *money politics* saat menjelang Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat Desa Sumberejo beranggapan setiap kali menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula tradisi yang sejak dulu dilestarikan itu harus ada. *Money politics* sudah menjadi tradisi turun-temurun atau budaya di setiap ajang Pemilihan Kepala Desa dari dahulu hingga sekarang. Jika tidak ada justru menurut masyarakat hal itu menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada di tengah masyarakat sejak dulu hingga sekarang.

Keempat, Faktor Kesempatan → Praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberejo tidak dapat terjadi jika tidak ada kesempatan bagi pelakunya dan bagi penerima, dimana pemberi membeli suara dengan bantuan uang yang dimilikinya sedangkan

penerima menerima uang sebagai tambahan dalam mencukupi kebutuhannya. Ajang *money politics* dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh *money politics* tersebut. Terjadinya *money politics* tentu saja bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan legal-legal saja.

Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk menambah penghasilan karena penghasilannya bekerja sehari-hari tidak mencukupi dalam memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Kesempatan yang ada juga dijadikan alasan masyarakat kelas bawah Desa Sumberejo bersedia menerima *money politics* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa. Mereka seakan menutup mata mereka dengan manfaat atau keuntungan yang diperolehnya sesaat dari adanya praktik *money politics* yang membudaya.

Jika dihubungkan antara makna *money politics* dengan faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi :

Pertama, Ekonomi → Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi dalam keberlangsungan hidupnya. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Jumlah kebutuhan seseorang yang satu selalu berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Manusia selalu melakukan segala cara untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, baik itu bekerja dengan keras maupun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan.

Seperti halnya dengan masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo yang tidak dapat dipisahkan dari *money politics* menjelang Pemilihan Desa walaupun mereka tahu jika perbuatannya melanggar aturan yang ada dalam masa kampanye menjelang Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat kelas bawah memiliki makna tersendiri pada praktik *money politics* yang membudaya ini. Pemaknaan yang termasuk dalam kategori ini meliputi : pemaknaan sebagai rejeki yang tidak terduga, pemaknaan sebagai tambahan rejeki, pemaknaan sebagai rejeki nompok, dan pemaknaan sebagai bonus rutin.

Penyebab masyarakat kelas bawah menerima *money politics* dari Sumantri ini karena adanya desakan ekonomi yang menghimpit sehingga mereka tidak berpikir panjang untuk menolak rejeki yang sudah ada. Untuk masyarakat yang serba kekurangan dalam hidupnya tidak ada waktu luang untuk berpikir masalah politik lebih jauh, yang terpikir hanya masalah ekonomi. Berbeda dengan orang yang tingkat ekonominya jauh lebih tinggi, mereka memiliki waktu luang untuk berpikir panjang bersedia terlibat atau tidak. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, orang yang mampu secara finansial pasti akan memiliki kesempatan untuk memperoleh jenjang pendidikan yang diinginkan, berbeda dengan orang yang untuk makan sehari-hari saja kekurangan.

Apabila tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, maka tingkat kesadaran politiknya juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dalam menyalurkan aspirasinya pada Pemilihan Kepala Desa akan dapat mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon Kepala Desa, berbeda dengan masyarakat kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran politik rendah.

Kedua, Tradisi atau Budaya → Tradisi atau budaya dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi atau perilaku tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah bahkan hilang.

Seperti halnya pada masyarakat kalangan kelas bawah yang selalu membudayakan dan melestarikan praktik *money politics* dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat cenderung terbiasa untuk melakukan apa yang sudah ada di masyarakat karena sudah dilestarikan dari waktu ke waktu setiap menjelang Pemilihan Kepala Desa. Adanya manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah walaupun sesaat membuat mereka terbiasa untuk terus melestarikan. Jika dalam suatu Pemilihan Kepala Desa tidak ada praktik *money politics* maka akan dirasa menyimpang dari budaya yang sudah ada.

Pemaknaan yang sudah dibangun oleh masyarakat bahwa *money politics* adalah tradisi turun-temurun merupakan sesuatu yang bersumber dari pemikiran dan anggapan politik mereka. Faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah membangun pemaknaan seperti ini dan bersedia menerima *money politics* dikarenakan adanya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Akibatnya pengetahuan akan dampak buruk yang dapat

ditimbulkan oleh *money politics* tidak dimiliki dan dipahami oleh masyarakat kelas bawah, bagi mereka meneruskan apa yang sudah ada di masyarakat selagi itu berguna pada masyarakat yang hidupnya kekurangan tidak dianggap salah dan sah-sah saja.

Faktor kebiasaan juga berperan dalam budaya praktik *money politics* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa dalam proses menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang seakan sudah menjadi rahasia umum dimana bagi masyarakat calon yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tertinggi ditingkat desa, sementara bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia bagus dan memiliki kompetensi yang memadai tapi tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan. Praktik ini sulit dihilangkan karena masyarakat sudah terbiasa sejak dahulu.

Ketiga, Balas Budi → Kehidupan ini dapat menjadi sulit jika kita berhutang budi dengan orang lain, karena hutang budi seperti kata pribahasa, “hutang emas dapat di bayar, namun jika hutang budi di bawa sampai mati”. Maka tidak heran jika banyak orang yang ingin membalas budi kepada orang lain yang sudah menolongnya. Seseorang yang kesulitan dalam hidupnya akan merasa terbantu jika ada seseorang yang bersedia membantunya walaupun ada maksud yang tersembunyi dibalik pertolongannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang dibantu tersebut akan melakukan segala cara untuk membalas kebaikan orang yang menolongnya.

Pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat kelas bawah dalam hidupnya mengenai *money politics* juga masuk pada kategorisasi balas budi, pemaknaan tersebut antara lain : pemaknaan sebagai ajang balas budi, pemaknaan sebagai perjanjian kerjasama/kontrak, dan pemaknaan sebagai ajang tolong-menolong. Tentunya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat kelas bawah memiliki pemaknaan tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain meliputi : faktor pendidikan, faktor tradisi, dan faktor kesempatan.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh secara langsung pada tindakan yang akan dilakukan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara mendalam dan lebih terstruktur. Akibatnya segala perilaku yang akan ditampilkan akan didasarkan pada pilihan yang sesuai dengan pemikiran secara mendalam apakah itu benar atau salah. Maka jika pengetahuan masyarakat tinggi akan *money politics* tidak akan muncul pemaknaan seperti itu, begitu pula sebaliknya.

Adanya kebiasaan dalam masyarakat juga sulit untuk menjauhkan praktik ini pada setiap menjelang

Pemilihan Kepala Desa. Yang terpenting dalam pikiran mereka hanyalah dapat tercukupinya kebutuhan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain (*simbiosis mutualisme*). Apapun akan mereka lakukan demi membalas budi orang yang sudah membantunya walaupun dengan memberikan hak pilihnya saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung dan tidak mengedepankan pilihan sesuai dengan kompetensi setiap calon. Ajang *money politics* dijadikan sebagai bisnis yang saling menguntungkan tanpa berpikir resiko dan dampak buruk yang nantinya ditimbulkan oleh *money politics* tersebut.

Terjadinya *money politics* tentu saja juga bisa disebabkan kurang tegasnya hukum di Indonesia. Walaupun aturan ini terlarang tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Hal tersebut menunjukkan faktor kesempatan juga berpengaruh disini. Sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan halal-halal saja untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa Sumberejo tidak pernah dapat dipisahkan dari *money politics*. Bentuk permainan *money politics* yang dilakukan oleh Sumantri meliputi pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan pada pembangunan fasilitas umum. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat, namun masyarakat kelas bawah menjadi sasaran utamanya karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk terpengaruh. Berbagai keterbatasan yang dimiliki menjadi dasar pandangan mereka dalam membangun pemaknaan dan anggapan politik yang di dorong oleh motivasi dari dalam diri. Jika dikaitkan dengan teori motivasi Abraham maslow makna *money politics* dan faktor penyebab menerima *money politics* mengacu pada tingkat kebutuhan paling dasar (fisiologis). Makna yang dibangun terdiri dari beragam pemaknaan, antara lain : sebagai rejeki yang tidak terduga, tambahan rejeki, rejeki nomplok, bonus rutin, tradisi turun-temurun, ajang balas budi, kontrak atau perjanjian kerjasama, dan ajang tolong-menolong antar sesama. Sebenarnya masyarakat sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan keuntungan sesaat membuat praktik itu masih dilestarikan ditengah masyarakat, (2) Faktor-faktor yang menyebabkan

masyarakat kelas bawah di Desa Sumberejo bersedia menerima *money politics* menjelang Pemilihan Kepala Desa antara lain yaitu : a) faktor ekonomi, b) faktor pendidikan, c) faktor tradisi, dan d) faktor kesempatan.

Saran

Dari hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian, maka saran yang peneliti berikan sebagai masukan ialah sebagai berikut : (1) Kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya menjauhi tindakan-tindakan *money politics* yang cacat hukum, sehingga kedepan negara Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur karena kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau *to be smart and good citizen*, (2) Dibutuhkan kesadaran politik masyarakat dalam memilih calon Kepala Desa yang benar-benar memahami seni menata desa dan memiliki tujuan menciptakan kebaikan bersama agar warga desa lebih sejahtera, (3) Diharapkan pada semua calon Kepala Desa agar tidak menggunakan jalan-jalan yang melanggar hukum maupun tata krama dalam berpolitik hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, (4) Perlunya penegakan hukum di Indonesia yang lebih tegas karena itulah yang akan membuat demokrasi berjalan sesuai kaidahnya dan perlunya penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kelas bawah di desa yang buta akan masalah politik untuk memilih berdasarkan hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UI Press.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Surabaya.
- Rahman, Arifin. 2010. *Demokrasi dan Masyarakat Beradab*. Surabaya: UNESA
- Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kealitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

<http://firmansyahlubis.blogspot.com/2012/02/tinjauan-kepala-desa-secara-umum.html> Diakses Kamis 28 Maret 2013.

<http://pkntradisimoneypolitics.blogspot.com.html> Diakses Minggu 02 Juni 2013.

<http://sugengwidodo.blogspot.com.html> Diakses Senin 01 Juli 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

